

INOVASI KEBIJAKAN UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI DESA-DESA KABUPATEN KLATEN: KAJIAN TIPOLOGI INOVASI DAN FAKTOR PENGARUH KEBERHASILAN

Elzananda Prasetyaningrum, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret

email: Elzananda07@student.uns.ac.id

Abstrak

Inovasi saat ini telah menjadi satu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini didukung berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar dalam penemuan, pengembangan maupun praktik inovasi. Bahkan saat ini, inovasi juga telah mengambil bagian dalam kesetaraan gender terutama bagaimana mengembangkan model inovasi berbasis gender. Inovasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) diperlukan sebagai alat untuk menyusun strategi untuk mencapai pembangunan yang merata tanpa memandang gender dan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tipologi inovasi dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung inovasi kebijakan dalam mendukung percepatan implementasi PUG di desa-desa Kabupaten Klaten. Penelitian ini dikaji menggunakan teori tipologi inovasi pelayanan publik untuk mengetahui tipe dan keberhasilan inovasi pelayanan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Program Katca Ketawa merupakan inovasi produk karena memberikan dampak mengurangi kasus kekerasan. Inovasi proses terlihat dari Program Gong Ceting yang dilaksanakan secara rutin. Inovasi metode terdapat pada Program Diskon Mami Ojol karena memberikan inovasi dalam mengantar alat kontrasepsi saat pandemi. Inovasi kebijakan sendiri dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Inovasi sistem berhasil dikembangkan dengan adanya aplikasi Elsimil yang membuat pencegahan stunting lebih efisien. Selain itu, Kabupaten Klaten memenuhi faktor keberhasilan yaitu kepemimpinan yang mendukung inovasi, pegawai yang terdidik dan terlatih, budaya organisasi, pengembangan tim dan kemitraan, dan orientasi pada kinerja yang terukur.

Kata Kunci: Inovasi Kebijakan, Pengarusutamaan Gender, Kabupaten Klaten, Tipologi Inovasi

Abstract

Innovation has now become a necessity in government administration, both at the central and regional levels. This is supported by various government policies that provide a breath of fresh air in discovery, development and innovation practices. Even today, innovation has also taken part in gender equality, especially how to develop gender-based innovation models. Gender mainstreaming (PUG) policy innovation is needed as a tool to develop strategies to achieve equitable development regardless of gender and sex. This research

aims to obtain an overview of the typology of innovation and determine the factors that support policy innovation in supporting the acceleration of PUG implementation in the villages of Klaten Regency. This research was studied using the typology theory of public service innovation to determine the type and success of service innovation. This type of research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, questionnaires and documentation studies. The research results found that the Katca Ketawa Program is a product innovation because it has the impact of reducing cases of violence. Process innovation can be seen from the Gong Ceting Program which is carried out regularly. Method innovation is found in the Mami Ojol Discount Program because it provides innovation in delivering contraceptives during the pandemic. The policy innovation itself was carried out by issuing Klaten Regency Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Gender Mainstreaming. The system innovation was successfully developed with the Elsimil application which makes stunting prevention more efficient. Apart from that, Klaten Regency meets the success factors, namely leadership that supports innovation, educated and trained employees, organizational culture, team and partnership development, and orientation to measurable performance.

Keywords: Policy Innovation, Gender Mainstreaming, Klaten Regency, Innovation Typology

Pendahuluan

Inovasi dalam sektor publik merupakan penemuan yang sengaja dibuat dan diterapkan dalam peran dan dirancang dengan signifikan agar menguntungkan masyarakat yang lebih luas (Palmer, 2005). Munculnya inovasi kebijakan dilatarbelakangi banyaknya permasalahan saat implementasi kebijakan. Kegagalan yang terjadi bukan karena kesalahan pada implementasi kebijakannya saja, namun juga pada tahapan proses perencanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini biasanya mengikuti alur sistemik dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Saat ini, inovasi telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam praktik administrasi negara, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar bagi penemuan, pengembangan, dan praktik inovatif. Melalui upaya banyak pihak, berbagai hasil inovasi bermunculan seiring perkembangan zaman, berdampak luas, dan berhasil dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Bahkan saat ini, inovasi berkaitan dengan kesetaraan gender, khususnya bagaimana model inovasi berbasis gender dikembangkan.

Inovasi kebijakan terkait gender sangatlah penting karena isu gender bukanlah isu sederhana di lokal maupun nasional, namun juga di internasional yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Isu yang dijadikan dasar dalam upaya meningkatkan taraf hidup perempuan dan anak adalah tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki, anak laki-laki dan perempuan dalam mengakses, berpartisipasi, mengelola dan memanfaatkan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan PUG dibutuhkan untuk menjadi alat agar tercapai pembangunan yang adil, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab

terhadap semua populasi yang ada. Kebijakan PUG bertujuan untuk menjalankan program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan partisipasi, pengelolaan, dan kepentingan perempuan di dalam program pembangunan. Untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang melaksanakan dan berkomitmen dalam implementasi PUG, pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE). APE merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada Kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas inisiatif dan capaian yang telah dilakukan dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai kesetaraan gender.

Di Jawa Tengah sudah hampir semua kabupaten dan kota mendapatkan penghargaan APE. Satu diantaranya Rembang yang meraih APE Kategori Mentor. Sementara, 12 kabupaten dan kota mendapatkan Kategori Utama, 13 daerah Kategori Madya, dan delapan daerah mendapatkan Kategori Pratama. Kabupaten Klaten termasuk daerah yang sudah disebutkan sebelumnya yang mendapatkan penghargaan APE. Kabupaten Klaten termasuk salah satu dari 11 Kabupaten yang belum pernah mendapatkan penghargaan APE di Jawa Tengah. Pada 13 Oktober 2021 akhirnya Kabupaten Klaten berhasil mendapatkan penghargaan APE Kategori Madya. Namun, meskipun baru pertama mendapatkan penghargaan APE, tetapi penghargaan yang didapatkannya langsung berada di Kategori Madya. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten berharap mendapatkan Penghargaan APE kembali di level yang sekurang-kurangnya sama dengan Penghargaan APE sebelumnya, bahkan menginginkan adanya peningkatan level di Kategori Mentor. Hal ini diimbangi dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Klaten.

Saat ini, Kabupaten Klaten sedang banyak melakukan inovasi untuk menangani masalah-masalah gender yang ada agar tetap tercapai kesetaraan dan keadilan gender. Seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Klaten memiliki beberapa inovasi program, yaitu Katca Ketawa, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA), Ojol Kontrasepsi, Gong Ceting, serta pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk desa. Selain itu, Kabupaten Klaten melakukan upaya untuk mempercepat implementasi PUG dengan menjangkau wilayah yang lebih luas tidak hanya di tingkat kabupaten saja, tetapi bahkan sampai di tingkat desa. Desa yang berada di sana juga dibebaskan dalam melakukan inovasi terhadap program PUG, sehingga setiap desa memiliki cara dan program yang berbeda-beda dalam menanggapi kebijakan PUG. Penelitian tentang inovasi Pengarusutamaan Gender memang sudah banyak dilakukan, namun penelitian tentang Pengarusutamaan gender di tingkat Desa belum banyak dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengetahui gambaran inovasi

implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Klaten diperlukan suatu analisis. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tipologi inovasi kebijakan yang berhasil dikembangkan dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Klaten.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-September tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dengan pertimbangan bahwa DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten memiliki program yang dapat mempercepat implementasi pengarusutamaan gender. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti mendapatkan data primer dari melakukan wawancara dan menyebarkan angket untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Informan wawancara pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kepala Desa Kranggan, dan Kepala Desa Kajoran. Responden yang mengisi dalam angket adalah peserta yang sudah pernah mengikuti pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tipologi inovasi milik Muluk dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi inovasi. Selanjutnya analisis data didukung dengan analisis interaksi model Miles & Huberman dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada bab hasil dan pembahasan akan dijelaskan mengenai inovasi kebijakan yang dikembangkan dalam mendukung percepatan implementasi PUG di desa-desa Kabupaten Klaten. Selain itu akan dipaparkan mengenai inovasi kebijakan yang dikembangkan menurut tipologi inovasi Muluk dan faktor pendukung keberhasilan inovasi berdasarkan faktor kritis dalam pengembangan inovasi di sektor publik milik Muluk. Hal ini perlu disampaikan karena informasi tersebut berkaitan dengan penjelasan yang lebih komprehensif yang akan menggambarkan inovasi kebijakan yang dikembangkan untuk mempercepat implementasi PUG di desa-desa Kabupaten Klaten.

1. Inovasi Kebijakan dalam Mendukung Percepatan Implementasi PUG Berdasarkan Tipologi Inovasi Muluk
 - a. Inovasi Produk

Tipologi inovasi milik Muluk ada lima tahapan dan di setiap tahapan memiliki kriteria indikator sendiri. Inovasi produk adalah inovasi yang

perubahannya dalam bentuk dan desain produk atau layanan. Inovasi produk adalah inovasi yang perubahannya dalam bentuk dan desain produk atau layanan. Pada poin ini dibahas dan dianalisis apakah inovasi yang dikembangkan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Desa Kajoran, dan Desa Kranggan sudah masuk ke dalam tipologi inovasi produk layanan milik Muluk. Ada inovasi produk terdapat tiga indikator untuk dikatakan berhasil. inovasi yang dikembangkan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Desa Kajoran, dan Desa Kranggan masuk ke dalam inovasi produk layanan. Alasannya karena memenuhi tiga indikator menurut inovasi produk layanan, yaitu, mampu memberikan dampak pengurangan kasus kekerasan perempuan dan anak kepada masyarakat melalui Program Katca Ketawa, DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Kepala Desa Kajoran, Kepala Desa Kranggan terlibat langsung dalam program dan kegiatan yang ada, dan berhasil dan mampu menciptakan produk inovasi yang baru dan sebelumnya tidak ada.

b. Inovasi Proses

Inovasi proses adalah inovasi dalam pembaruan kualitas dan dilakukan secara kontinu yang berpedoman pada perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan. Pada indikator ini dibahas dan dianalisis apakah inovasi yang dikembangkan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Desa Kajoran, dan Desa Kranggan sudah masuk ke dalam tipologi inovasi proses layanan milik Muluk

Inovasi yang dikembangkan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Desa Kajoran, dan Desa Kranggan masuk ke dalam inovasi proses. Alasannya karena memenuhi tiga indikator menurut inovasi produk layanan, yaitu program inovasi Gong Ceting yang ada sudah dilaksanakan secara rutin, program yang ada sudah efektif, efisien, dan tidak membebankan dibanding dengan cara yang lama, hasil survei kepuasan masyarakat mendapat nilai baik yang artinya dalam hal ini kepuasan masyarakat menjadi indikator utama yang harus dicapai. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada tumpang tindih dan tidak adanya pengurangan jumlah *stakeholders*. Alasannya adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada saling memiliki keterkaitan dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan PUG.

c. Inovasi Metode

Inovasi metode merupakan inovasi yang dilakukan dalam hal interaksi dengan masyarakat atau cara baru dalam memberikan pelayanan dengan masyarakat (Muluk, 2008). Inovasi yang

dikembangkan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Desa Kajoran, dan Desa Kranggan masuk ke dalam inovasi metode. Alasannya karena memenuhi tiga indikator menurut inovasi produk layanan, yaitu program inovasi Diskon Mami Ojol memberikan cara baru terhadap proses kerja dalam menyalurkan alat kontrasepsi pada saat pandemi dengan menggunakan ojek *online*, program yang ada merupakan hasil inovasi setelah sebelumnya kurang efektif dalam pelaksanaannya, dan inovasi yang diterapkan mencakup bidang yang lebih luas.

d. Inovasi Kebijakan

Inovasi kebijakan adalah inovasi yang dilakukan berpedoman pada visi, misi, tujuan, serta strategi baru sesuai dengan realita yang ada (Muluk, 2008). Inovasi yang dikembangkan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Desa Kajoran, dan Desa Kranggan masuk ke dalam inovasi kebijakan. Alasannya karena memenuhi dua indikator menurut inovasi produk layanan, yaitu adanya kebijakan yang dibuat untuk menangani masalah yang ada, adanya peningkatan kesuksesan setelah kebijakan PUG diterapkan. Namun, di Desa Kranggan masih belum bisa melihat apakah kegiatan selama ini yang dijalankan mengalami peningkatan kesuksesan karena hal ini masih baru.

e. Inovasi Sistem

Inovasi sistem adalah inovasi yang dilakukan dalam tata kelola pemerintah atau inovasi tentang cara berinteraksi dengan stakeholders lainnya. Inovasi yang dikembangkan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Desa Kajoran, dan Desa Kranggan masuk ke dalam inovasi sistem. Alasannya karena memenuhi dua dari tiga indikator menurut inovasi sistem, yaitu program yang dirasa sudah tidak efektif dilakukan pengembangan lagi dengan elemen yang berbeda, mengedepankan kenyamanan untuk masyarakat sehingga mempermudah dalam komunikasi melalui aplikasi Elsimil, namun, pada indikator ketiga ini tidak memenuhi kriteria penentuan dikarenakan tidak adanya pengurangan terhadap sumber daya dalam program inovasi yang ada.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi Berdasarkan Faktor-Faktor Kritis dalam Pengembangan Inovasi Sektor Publik Milik Muluk

Keberhasilan inovasi yang dilakukan untuk mendukung percepatan implementasi PUG sampai di tingkat desa dapat didukung pula dengan ketersediaan faktor-faktor kritis pengembangan inovasi, yaitu:

a. Kepemimpinan yang Mendukung Inovasi

Kepemimpinan yang mampu mendukung keberjalanan inovasi merupakan faktor utama untuk inovasi yang ada di pemerintahan. Kepemimpinan yang dimaksud bukan hanya yang mendukung inovasi

saja, tetapi pemimpin yang mampu memberikan arahan strategis bagi seluruh elemen organisasi. Keberjalanan proses inovasi juga membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan perubahan, mampu menyadarkan tentang arti penting inovasi, dan mampu menggerakkan yang mendukung proses inovasi. Pada faktor ini terjamin kepemimpinan yang mampu mendukung inovasi karena memenuhi dua indikator, yaitu pemimpin yang mendukung proses inovasi dengan memberikan arahan strategis arahan strategis bagi Bidang PPPA tertuang dalam Rencana Strategis DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Bab II halaman 42 dan pemimpin mampu memupuk motivasi dengan memberikan pernyataan bahwa inovasi yang dibuat di masing-masing bidang itu bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

b. Pegawai yang Terdidik dan Terlatih

Pegawai yang terdidik dan terlatih dapat dicapai dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Pengembangan pengetahuan dan keahlian dapat dicapai dengan menyediakan teknologi terkini. Tanpa fasilitas yang memadai, keterampilan karyawan akan tertinggal dibandingkan kemajuan pengetahuan yang pesat. Pegawai yang terdidik dan terlatih masuk ke dalam SDM yang merupakan salah satu faktor utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di bidang sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk keluarga berencana untuk mewujudkan pelayanan yang baik. Pada faktor ini terjamin pegawai yang terdidik dan terlatih karena memenuhi indikator ketersediaan akses bagi pegawai terhadap teknologi dan pengetahuan mutakhir.

DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten sudah menyediakan perlengkapan alat kantor seperti komputer, laptop, *wifi*, dll. Jumlah pegawai yang sudah menempuh pendidikan S1 lebih banyak dibandingkan dengan SMP Sederajat, SMA Sederajat, dan D3. DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten juga terus melakukan peningkatan pendidikan dan keahlian pada pegawai untuk mempercepat pencapaian target. Selain itu, Desa Kajoran dan Desa Kranggan, masyarakatnya diberikan pelatihan-pelatihan terkait PUG untuk meningkatkan kemampuan atau *skill*.

c. Budaya Organisasi

Budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting bagi kinerja sebuah organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme dalam pembuat makna dan pembentuk sikap serta perilaku pegawai di dalam suatu organisasi. Tanpa adanya budaya organisasi dapat membuat

pegawai tidak bekerja dengan maksimal. Itu sebabnya budaya organisasi menjadi faktor yang krusial bagi setiap organisasi. Setiap OPD yang ada di Kabupaten Klaten wajib memiliki budaya kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Pada faktor ini terjamin budaya organisasinya karena memenuhi indikator budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme dalam pembuat makna dan pembentuk sikap serta perilaku pegawai di dalam suatu organisasi.

DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten juga memiliki budaya kerja berupa absen rutin setiap masuk dan pulang yang diisi melalui *handphone*, kemudian harus membuat e-kinerja terkait kegiatan yang dilakukan di hari itu. Nantinya akan di unggah juga di sistem setiap hari. Kemudian Desa Kajoran dan Desa Kranggan juga memiliki budaya kerja yang dilaksanakan sesuai adat dan budaya yang ada, serta membangun budaya komunikasi yang baik dengan masyarakat.

d. Pengembangan Tim dan Kemitraan

Keberhasilan sebuah tim dapat dinilai dari tiga hal, yaitu produk atau jasa yang dihasilkan, upaya yang dilakukan untuk terus berkarya, serta kepuasan anggota tim itu sendiri. Pengembangan tim ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja sama tim. Setiap pegawai tidak hanya berkenalan dengan satu tim saja, namun dapat berkomunikasi dengan tim lain yang berguna untuk meningkatkan kerja sama antar tim maupun dengan tim lainnya. Tim kerja inovasi dapat dikatakan berhasil jika mampu menghasilkan suatu produk atau jasa. Hal tersebut dapat dilihat melalui produktivitas tim yang dinilai dari kualitas inovasi dalam menyelesaikan persoalan baik itu persoalan publik. Pada faktor ini terjamin pengembangan tim dan kemitraan karena memenuhi tiga indikator, yaitu produk atau jasa yang dihasilkan, upaya yang dilakukan untuk terus berkarya, serta kepuasan anggota tim itu sendiri.

DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten berhasil membuat inovasi yang mampu memberikan dampak pengurangan kasus yang ada di Kabupaten Klaten. Melalui Katca Ketawa dapat mengurangi kasus seperti KDRT. Upaya yang dilakukan oleh OPD (DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten, Desa Kajoran, dan Desa Kranggan) dalam penelitian ini adalah dengan meningkatkan komitmen, meningkatkan koordinasi yang baik, *upgrade* ilmu, meningkatkan komunikasi yang baik, dan meningkatkan SDM yang ada. Selain itu Kepala Bidang PPPA dan Kepala Desa Kajoran menyampaikan bahwa kepuasan didapatkan saat meraih penghargaan

APE Kategori Madya pada tahun 2023 dan mendapatkan penghargaan Desa Layak Anak Kategori Nindya.

e. Orientasi Pada Kinerja yang Terukur

Manajemen kinerja inovasi ini meliputi penyusunan, pengukuran, dan apresiasi kinerja inovasi. Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara memberikan imbalan atau *reward*. Salah satu manfaatnya kinerja yang terukur adalah dapat mengetahui keberhasilan pegawai dalam bekerja. Nantinya penilaian pada kinerja terukur dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait gaji, bonus gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Pada faktor ini terjamin pengembangan tim dan kemitraan karena memenuhi tiga indikator.

DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten tidak memberikan *reward* berupa uang, namun dalam bentuk piagam yang didapatkan saat meraih penghargaan. Kemudian Desa Kajoran memberikan *reward* berupa pelatihan-pelatihan terkait PUG, piagam, piala, dan uang pembinaan yang didapatkan dari lomba. Namun, di Desa Kranggan belum dapat memberikan *reward* karena masih mengusahakan dan mengembangkan inovasi untuk meraih penghargaan.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Klaten termasuk ke dalam lima tipologi menurut Muluk. Namun, masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi kriteria penentuan. Program Katca Ketawa dapat dikatakan sebagai inovasi produk karena dapat memberikan dampak pengurangan kasus kekerasan, DINSOSP3AKB Kabupaten Klaten terlibat langsung dan memiliki peran dalam program tersebut, dan Katca Ketawa merupakan program yang baru. Program Gong Ceting dapat dikatakan sebagai inovasi proses karena dilaksanakan secara rutin selama tiga bulan berturut-turut, dalam proses menekan angka stunting dilakukan secara efektif dan efisien, serta kepuasan masyarakat menjadi hal penting. Program Diskon Mami Ojol dapat dikatakan sebagai inovasi metode karena memberikan cara baru dalam membagikan alat kontrasepsi dan merupakan cara efektif untuk mencegah terjadinya baby bloom. Kabupaten Klaten melakukan inovasi kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Terakhir, aplikasi Elsimil dapat dikatakan sebagai inovasi sistem karena mengedepankan kemudahan dalam edukasi stunting kepada calon ibu melalui aplikasi.

Referensi

- Antasari, R. R., & Hadi, A. (2017). *Implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang*. AL MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 10(1), 132-161.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, 2019-2021: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten*.
- Barru, S. A. G. (2019). *INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK*. Meraja Jurnal, 2(3), 1-13.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.
- Daming, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(4).
- Feradis. (2021, Maret 15). *Anugerah Parahita Ekapraya*. Kumparan.
- Gainau, P. C. (2018). *Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah*. BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF, 10(2), 126-143.
- Ghufroni, F., Rahmatunnisa, M., & Sholihah, R. (2022). *Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Brebes*. JANE Jurnal Administrasi Negara, 13(2), 319-330.
- Harun, A. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang)*. JURNAL TRIAS POLITIKA, 1(1).
- Harya, G. I. (2018). *Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pacitan*. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 18(2).
- Ilham, T., & Velianto, A. U. (2022). *Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48(1), 127-140.
- Kardiat, Y. (2022). *INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK*. Jurnal Pallangga Praja (JPP), 4(2), 143-149.
- Kartiwi, K., Pitono, A., Arwanto, A., & Baidhowah, A. R. (2022). *Inovasi Dan Pembangunan Desa Di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas Kesejahteraan Dan Kesetaraan Gender*. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 59-81.